



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUHARIYANTO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632907

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 650.000.000

1. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, LAINNYA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 123 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, WARISAN Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 351.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, LAINNYA Rp. 120.000.000
6. MOBIL, IZUZU DUMPTRUK Tahun 2012, LAINNYA Rp. 170.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.550.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.009.550.000



III. HUTANG

Rp. 41.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 968.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUNUS ALI GHAFI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632875

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	425.000.000
1. Tanah Seluas 219 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, WARISAN Rp. 425.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	13.000.000
1. MOTOR, ZUSUKI BEBEK Tahun 2013, LAINNYA Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2011, LAINNYA Rp. 6.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	2.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	2.650.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	442.650.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	211.700.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	230.950.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : INSIYATUN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 656315

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m<sup>2</sup>/3 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m<sup>2</sup>/2 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SAMPANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 381.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK/CV 150 R Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA VENTURE 2,4 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 81.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 11.000.000

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 42.840.846

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 11.000.000

**Sub Total** Rp. 1.626.840.846

**III. HUTANG** Rp. 400.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.226.840.846

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHALLI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632958

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.983.700.000

1. Tanah Seluas 77 m2 di BANGKALAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 46.200.000
2. Tanah Seluas 3.500 m2 di SAMPANG, WARISAN Rp. 1.750.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di SAMPANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 187.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 153.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMIX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G F601RM Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.137.300.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.137.300.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **LUDDIN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **637296**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m<sup>2</sup>/15 m<sup>2</sup> di SAMPANG, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m<sup>2</sup>/30 m<sup>2</sup> di SAMPANG, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1.200 m<sup>2</sup> di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **15.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **27.982.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **742.982.000****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **742.982.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.